



Pelanggaran PPKM Terus Terjadi

- ▶ Pemda DIY mendapat evaluasi dari Kapolri terkait dengan regulasi penegakan protokol kesehatan yang kurang terperinci.
- ▶ Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 222 penambahan kasus positif, 259 kasus sembuh, dan tujuh kasus dilaporkan meninggal dunia, pada Senin.



JOGJA-Pelanggaran protokol kesehatan masih saja terjadi meski Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY diperpanjang. Regulasi mengenai penegakan protokol kesehatan di DIY dinilai kurang terperinci.

Lugas Subarkah, Abdul Hamid Razak,
& Ujung Hesenudin
redaksi@harianjogja.com

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menuturkan selama tiga pekan pelaksanaan PTKM, jawatannya menemukan 2.503 pelanggaran yang didominasi pemakaian masker, jam tutup operasional tempat usaha, dan pembatasan makan di tempat 25%. Dari sejumlah pelanggaran tersebut, Satpol PP DIY telah menutup sementara 86 tempat usaha selama 3X24 jam.

Noviar menambahkan untuk pelanggaran pemakaian masker, Satpol PP memberi sanksi berupa penyitaan sementara KTP dan pemberian edukasi kondisi Covid-19 di DIY. "Tujuannya pembinaan, kami kasih tahu angka positif di DIY berapa, sembuh berapa, meninggal berapa, ketersediaan *bed* berapa. Kami kasih tahu sehingga mereka paham Covid-19 di DIY sudah sangat bahaya," ujarnya, Senin (1/2).

Terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang tidak efektifnya PTKM, menurutnya secara substansial hal tersebut memang benar, mengingat tidak terjadi pengurangan kasus harian Covid-19 secara signifikan selama PTKM. "Dengan pengetatan yang dilakukan ternyata angka positif tidak menurun," kata dia.

▶ Halaman 10

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Pelanggaran PPKM...

Ia juga mengungkapkan Penda DIY mendapat evaluasi dari Rapiro terkait dengan regulasi penegakan protokol kesehatan yang kurang terperinci. "Misal aturan pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, item itu harus dijelaskan dulu. Misal cuci tangan, setiap toko harus siapkan satu petugas sebagai penjaga," kata dia.

Hal ini belum diatur dengan jelas dalam Peraturan Gubernur DIY No. 77/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. "Ini yang diminta Pusat diperjelas lagi regulasinya," ujarnya.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Sleman. Juru Bicara Satgas Covid-19 Sleman, Shavitri Nurmala Dewi, mengatakan berdasarkan laporan terbaru Tim Patroli PTKM Sleman dan semua Kaparewon masih ditemukan pelanggaran jam operasional hingga protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Selama masa perpanjangan PTKM, total lokasi yang dikunjungi tim patroli kabupaten sebanyak 556 titik dan 2.542 titik dikunjungi oleh masing-masing tim dari kaparewon," katanya.

Dari jumlah tersebut, lanjut Erie, tim menemukan setidaknya 1.665 kasus pelanggaran tidak memakai masker, 980 kasus tidak jaga jarak, dan 642 kasus kurangnya sarana prasarana protokol Covid-19. "Selengkapnya lihat grafts." "Sebanyak 802 kasus merupakan pelanggaran jam operasional yang diatur dalam Instruksi Bupati terkait Covid-19 di tingkat desa," katanya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Windarto, mengakui pelanggaran PTKM masih ditemukan meskipun jumlahnya menurun. Agus masih menerapkan imbauan persuasif dan sanksi sesuai ketentuan yang ada, dari teguran lisan, surat peringatan tertulis dan terakhir baru penutupan usaha. "Ya sebenarnya landai, tapi ya masih tetap harus diingatkan terus," jelasnya.

Diakui Agus, jenis pelanggaran jam buka operasional masih ditemui saat pengawasan. "Sanksi sista KTP belum diterapkan, lihat perkenangan besok. [Pelanggaran masker] tetap masih ada, sekaligus kami ingatkan saat itu," katanya.

Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suhartaeslana mengatakan selama masa perpanjangan PTKM ini telah menindak 53 pelanggaran, sebagian besar adalah restoran dan warung makan. Bahkan pada Minggu (31/1) malam, petugas menutup tiga warung makan dan kafe di kawasan kuliner Pasar Bantul dan satu warung makan di Kecamatan Kasihan.

Yulius tidak menampik masih banyak pelanggaran jam buka operasional dan juga pelanggaran protokol kesehatan di masa perpanjangan PTKM ini. "Terutama kuliner di malam hari selain melanggar jam operasional juga melanggar proses," ucap Yulius.

Dia berharap pelaku usaha dan masyarakat mematuhi

Instruksi Bupati Bantul tentang perpanjangan PTKM untuk menekan angka penularan Covid-19 di Bantul yang masih tinggi. "Tanya kesadaran masyarakat penularan Covid-19 sulit ditekan," kata Yulius.

Protokol Kesehatan

Sekda DIY, Kadarnata Baskara Ali, mengatakan kasus harian Covid-19 masih cukup tinggi disebabkan masyarakat yang abai pada protokol kesehatan. "Abainya itu karena dua macam, kerumunan karena aktivitas ekonomi dan penularan sudah sampai kelompok kecil seperti keluarga dan tetangga," katanya.

Penularan yang sudah sampai pada kelompok kecil menurutnya sulit dihindari karena memakai masker tidak dilakukan di dalam rumah atau lingkungan sekitar. Untuk itu Penda DIY mendorong pembentukan kembali posko Covid-19 di tingkat desa.

Kami belum punya pertimbangan yang lain biarpun kemarin ada modifikasi [PTKM] ya. Nanti kami lihat dulu hasilnya, tidak bisa sekadar [memutuskan PTKM efektif atau tidak dan lanjut atau tidak].

Sri Sultan HB X
Gubernur DIY

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan PTKM tahap kedua masih berjalan sehingga Penda DIY belum memutuskan apakah kebijakan itu bisa dikatakan efektif atau tidak. "Kami belum punya pertimbangan yang lain biarpun kemarin ada modifikasi [PTKM] ya. Nanti kami lihat dulu hasilnya, tidak bisa sekadar [memutuskan PTKM efektif atau tidak dan lanjut atau tidak]," kata Sultan.

Sultan mengakui angka kasus baru positif Covid-19 di DIY menurun. Nantinya data itu yang menjadi acuan berlanjut tidaknya PTKM.

"Yang jelas kan untuk yang positif sama yang meninggal kan persentasenya ada penurunan. Nanti kami lihat hasilnya dulu," ucapnya.

"Karena tidak bisa terus sekaligus [diputuskan PTKM lanjut atau tidak], sehingga nang kosongnya bed sudah lebih besar. Mungkin antarlacah juga bisa berbeda-beda [implementasi kebijakan PPKM]," ujarnya.

Sri Sultan HB X, mengatakan penularan di kelompok kecil perlu diputus. "Kalau tidak perlu ya *rasah, norogo, rasah agobot*. Makanya saya tekankan kabupaten-kota untuk ambil inisiatif [posko] di desa," katanya.

Implementasi Tidak Jelas

Epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad, mengatakan implementasi PPKM tidak jelas. "Tidak jelas itu PPKM mau *ngapain*, sekian orang diminta seperti ini-ini, tapi target apa yang mau dicapai tidak jelas sehingga implementasinya juga tidak jelas," kata Dony sapaan akrab Riris Andono Ahmad.

Dony menambahkan sudah seharusnya pemerintah melibatkan epidemiolog dalam menentukan kebijakan PPKM. "Ya sepatutnya kan, karena prinsip pengendalian penyakit kan basisnya epidemiolog. Sudah sepatutnya kalau orang epidemiolog dilibatkan," ujar Riris.

Riris mengatakan jika pemerintah meminta dia terlibat dalam perumusan PPKM, ia dengan senang hati menanggapi. Menurut Riris, pemerintah harus memiliki target berapa orang dan sektor mana saja yang akan dihentikan pergerakannya selama PPKM.

Atapun, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, mendorong pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) murni. "Jadi PSBB sesuai UU saja jangan dimodifikasi. Seluruh penerusan ada klinik demam, itu akan jadi solusi keterbatasan *testing*, klinik demam ini solusinya isolasi karantina, kita perbanyak fasilitas isolasi karantina, untuk memutus kecepatan virus ini bertambah," jelas Dicky Budiman.

Dicky mengatakan efek dari penerapan PPKM tidak signifikan karena PPKM merupakan PSBB yang dilonggarkan. "Dari awal saya sampaikan tidak akan efektif. PSBB yang dimodifikasi yang sudah kita lihat ya tidak ada yang efektif," kata Dicky.

Menurut Dicky, PPKM bisa efektif bila kasus Covid-19 di Indonesia tidak sebesar sekarang. Dicky mengaku telah mengusulkan ke pemerintah soal penerapan PPKM dalam ruang lingkup komunitas sejak akhir Maret 2020.

Penambahan Pasien

Sementara itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 222 penambahan kasus positif hasil pemeriksaan pada 1.135 sampel dari 1.098 orang, 259 kasus sembuh, dan tujuh kasus meninggal dunia, pada Senin.

Juru Bicara Penda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisili meliputi Sleman (63 kasus), Bantul (62), Gunungkidul (41), Kulonprogo (37), dan Kota Jogja (19).

Dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari tracing kasus positif (132 kasus), periksa mandiri (58), perjalanan luar daerah (11), screening pasien (1), dan belum ada keterangan (29).

Dengan penambahan ini, total kasus positif DIY menjadi 22.047 kasus, dengan rincian 6.192 kasus aktif, 15.340 kasus sembuh, dan 515 kasus meninggal. (Sumber: [Bali, asumsi/berita](#))

Presiden Joko Widodo menyebut kebijakan Penerapan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku di Jawa dan Bali belum efektif karena tidak berhasil menekan penambahan kasus harian Covid-19. Di DIY Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) sudah berjalan selama tiga pekan. Selama kebijakan itu diterapkan kasus Covid-19 di DIY masih naik turun.



Sanksi penutupan
tempat usaha 3X24 jam
86 tempat usaha



- Pemakaian masker
- Jam tutup operasional tempat usaha
- Pembatasan makan di tempat 25%.



- Langgar jam operasional 172
- Melebihi kapasitas pengunjung 25% 24
- Pegawai WFO yang melebihi 25% 5

■ Teguran	171
■ Surat peringatan	21

■ Tak memakai masker	1.665
■ Tidak jaga jarak	980
■ Kurang sarana prasarana prokes	642
■ Jam operasional	802

■ Edukasi dan sosialisasi	2.687
■ Teguran lisan	1.284
■ Pemberkasan BAP	60
■ Membubarkan kerumunan	235

Grafis: Harian Jogja/Tri H. | Sumber: Satpol PP DIY/Kota Jogja/Sleman

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005